DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2004).

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010).

Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan Jilid I*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).

Daymond, Christine dan Immy Hooloway, *Qualitative Methods in Public Relation and Marketing Communication*, diterjemahkan Cahya Wiratama, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008).

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994).

Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2011).

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Sumardjono, Maria S.W., dkk, *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

----------, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

----------, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).

B. Website

http://carol-sinambela.blogspot.com/2008/08/penelitian-deduktif.html

http://www.bpn.go.id/

C. Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.